TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2015 | Hal. : 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temukan Aset Tahun 1990

Muslimin Enggan Ganti Kerugian Negara

SINGKAWANG, TRIBUN- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang Muslimin, mengakui berhasil menemukan beberapa aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Saat ditemukan, aset tersebut kondisinya tidak beroperasi.

Sebelumnya, BPK merilis adanya temuan aset sebesar Rp 58 miliar. Hal itu memaksa DPPKA untuk segera membuat laporan keberadaan sejumlah aset tersebut.

"Sebagian sudah kita ketahui di mana saja barangnya. Lampiran mengenai aset yang menjadi temuan sudah kita sampaikan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dilacak kembali," kata Muslimin kepada *Tribun*, Jumat (24/4).

Muslimin mengungkapkan satu di antara aset yang ditemukan adalah sepeda motor operasional di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) tahun 1990an. Saat ini kondisinya sudah tak laik pakai.

"Walau hanya bangkainya tapi jelas barangnya ada. Seluruh SKPD sudah kita minta menyiapkan dokumen sekaligus mengecek kelengkapannya," katanya.

> "Siapa yang mau membayar ganti rugi Rp 58 Miliar. Makanya ini bisa menjadi kronis jika tak segera diselesaikan."
>
> **MUSLIMIN**
> Kepala DPPKA Kota Singkawang

Dari sekian banyak aset yang ada, terutama kendaraan mungkin juga mengalami persoalan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang ataupun pajak yang lama tak dibayarkan. Dengan menelusuri kembali dan mengecek kondisinya, bisa saja yang tak layak lagi dihapus atau dilelang.

"Paling prinsip adalah mengurangi jumlah temuan itu. Sebab jika tidak diselesaikan, bisa menjadi kerugian negara," katanya.

Dirinya mengingatkan, aset tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Demikian pula jika di kemudian hari menjadi kerugian negara, maka SKPD terkait yang harus mempertanggung jawabkannya.

"Siapa yang mau membayar ganti rugi Rp 58 Miliar. Makanya ini bisa menjadi kronis jika tak segera diselesaikan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra menanggapi positif upaya DPPKA menyisir aset yang menjadi temuan BPK. Menurutnya, temuan BPK berpengaruh terhadap penilaian kinerja suatu pemerintahan.

"Jika kita tidak serius mengurus aset, maka penilaian negatif akan kita dapatkan. Oleh karenanya, harus dilakukan tindak lanjut dari temuan itu," katanya.

Kalaupun kemudian aset tidak ditemukan karena hilang atau dicuri, paling tidak ada bukti bahwa hal itu benar-benar hilang. Bisa saja dengan bukti laporan kepolisian. "Yang pentingkan jelas. Apa masalahnya dan bagaimana solusinya," kata dia. **(dum)**